

PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

**(Studi Kasus Peserta Program Keluarga Harapan
di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)**

Faiz Aminuddin

Dosen Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Email: fifa_iz@yahoo.com

Ahmad Thoyib Syir'ah

Alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Jawa Tengah

Email: ahmadt540@gmail.com

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) is a program of conditional aid earmarked for Family Very Poor (KSM) in improving the quality of life through education and health. The government launched PKH aid flows Rp. 950,000.00 - Rp. 3,700,000.00/KSM and followed by counseling and evaluation. This study aims to determine the implementation of the CCT in the District Tayu Pati Regency and the implications of the implementation of the CCT to the participation of children's education PKH aid beneficiaries in the district Tayu Pati regency. This study uses field research is descriptive qualitative. The results showed that PKH in District Tayu Pati regency run in accordance with the targets set by the Central UPPKH. UPPKH District of Tayu participate in the improvement of education of children of KSM by the number of face to face over the number 85%. Such participation has implications for life PKH aid beneficiaries include: the establishment of a responsible society, awareness of the importance of education, increased awareness of higher education and the formation of the educated beneficiaries of PKH.

Keywords: *Participation, Education, Program Keluarga Harapan.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena yang jelas terlihat di Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks dan multidimensi dengan ditandai oleh keberadaan pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan dalam segi ekonomi, melainkan juga ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan pangan yang layak.¹

Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersifat bantuan tunai (bersyarat). PKH bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) yang dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam mempertahankan daya beli pada waktu Pemerintah menaikkan harga BBM. PKH lebih dimaksudkan terhadap upaya membangun sistem sosial kepada masyarakat miskin.

Program serupa PKH di negara lain, terbukti sangat bermanfaat terutama bagi keluarga miskin kronis. Secara umum tingkat kemiskinan pada rumah tangga terkait dengan kesehatan dan pendidikan, rendahnya

¹ Istiana Hermawati, dkk, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Yogyakarta: B2P3KS PRESS, 2012), hlm 1.

penghasilan keluarga sangat miskin (KSM)² menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan untuk tingkat minimal sekalipun, rendahnya pendapatan KSM juga berdampak terhadap pemeliharaan kesehatan ibu mengandung sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan bahkan kematian bayi atau ibu. Menurut data pada tahun 2015 angka kematian bayi pada kelompok berpendapatan rendah adalah 61%, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi adalah 17%. Angka kematian bayi di Indonesia memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu 600 bayi setiap 100.000 kelahiran.³ Selain itu UNICEF mencatat, terdapat 2,5 juta (600 ribu anak usia SD atau sederajat dan 1,9 juta anak usia SMP atau sederajat) yang tidak tercatat di dalam sistem pendidikan.⁴

Pada tahun 2013 PKH telah tersebar merata yang mencakup 33 provinsi dan seluruh kabupaten yang berada di Indonesia, salah satu wilayah yang memperoleh bantuan PKH adalah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Menurut data dari BKKBN pada tahun 2009 jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Tayu adalah 68.939 yang tersebar pada 20.913 KK atau 36,41% dari keseluruhan penduduk di Kecamatan

² Pada awal Program Keluarga Harapan disebut Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sekarang Istilah tersebut diganti dengan Keluarga Sangat Miskin (KSM).

³ http://www.unicef.org/indonesia/id/A5_-_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf, diakses pada 03 Februari 2016.

⁴ <http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah->, diakses pada 03 Februari 2016.

Tayu. Selain itu, menurut data tersebut Kecamatan Tayu juga memiliki 7.615 KK pra sejahtera.⁵

Jumlah penduduk miskin sebanyak 68.939 tersebut dapat menjadi indikator bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Tayu yang belum mampu untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasarnya. Indikator lainnya adalah masih banyaknya angka putus sekolah dan rumah tangga kumuh di wilayah Kecamatan Tayu. Maka, tepat jika wilayah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati memperoleh Program Keluarga Harapan yang memiliki fungsi sebagai sistem perlindungan sosial bagi KSM. PKH merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin melalui kebijakan, pengawasan dan evaluasi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah menerapkan implementasi PKH di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati serta implikasi PKH yang kemudian terjadi terhadap tingkat partisipasi pendidikan warga dampingan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan, Studi Kasus Peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait partisipasi pendidikan penerima manfaat bantuan

⁵ <http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/121-kemiskinan-daerah-di-kabupaten-pati>, diakses pada 03 Februari 2016.

PKH dan implikasi dari PKH terhadap penerima manfaat bantuan PKH. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu (1) Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai manfaat dari program keluarga harapan dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan bagi keluarga sangat miskin (2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat merasakan dan mengetahui akan segala permasalahan keluarga sangat miskin, dengan adanya penelitian ini pengembang masyarakat memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi keluarga sangat miskin, baik berupa fasilitator maupun mediator. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi instansi lain mengenai potensi dan masalah yang ada kaitannya dengan program pemberdayaan masyarakat miskin.

Adapun telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oktiano Regian Zufri yang berjudul *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang*⁶ pada tahun 2014, hasil penelitian yang dilakukan lebih mengarah kepada pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan PKH, seperti adanya pemilihan dan penetapan peserta, pertemuan awal, tahap pembayaran, pembentukan kelompok serta proses pengaduan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Grace Leliharni Damanik yang berjudul *Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan*

⁶ Oktiano Regian Zufri "*Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang*", Skripsi Universitas Jember dalam <http://repository.unej.ac.id> diakses pada 03 Februari 2016.

Medan Selayang⁷ pada tahun 2013, penelitian yang mengukur pada persepsi, sikap dan partisipasi masyarakat (KSM) yang diartikan sebagai responden terhadap Program Keluarga Harapan, dengan hasil masyarakat yang positif terhadap program tersebut, karena responden mengetahui tujuan dan manfaat dari PKH.

Dilihat dari tanggapan masyarakat yang setuju dengan pelaksanaan PKH karena responden menilai program tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari keaktifan KSM dalam setiap kegiatan pertemuan dan pelaksanaan kewajiban KSM sebagai peserta dari PKH. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa respon KSM terhadap PKH di Kecamatan Medan Selayang adalah positif. Terakhir adalah penelitian penelitian yang dilakukan oleh Fitri Puspitasari yang berjudul Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul⁸ pada tahun 2013, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Puspitasari menjelaskan bahwa peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada peserta (KSM), tugas dari pendamping adalah memberikan arahan, tata cara dan perihal yang terkait dengan program bantuan tersebut, pendamping merupakan elemen penting pada PKH, karena perannya sebagai penghubung antara pemerintah dengan penerima bantuan (KSM).

⁷ Grace Leliharni Damanik *"Respon Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang"*, Jurnal Universitas Sumatra Utara dalam <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/2136> diakses pada 03 Februari 2016.

⁸ Fitri Puspita Sari *"Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul"* Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogya Karta dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 3 Februari 2016.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas yang membedakan dengan penelitian kami adalah perbedaan fokus pada penelitiannya, meskipun beberapa penelitian tersebut membahas mengenai program PKH yang berkaitan dengan pendidikan, namun beberapa penelitian tersebut tidak terfokus pada pendidikan bagi penerima manfaat PKH. Selain itu kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah sehinggapemaparan yang terkait dengan penelitian yang peneliti buat sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian mengenai peningkatan partisipasi pendidikan penerima manfaat PKH akibat dari pengaruh bantuan PKH masih sangat minim dilakukan, meskipun pendidikan bukan satu-satunya program dari PKH, namun pendidikan merupakan bagiankunci utama untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi.

B. Landasan Teori

Partisipasi dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta di dalamnya.⁹

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik.¹⁰ Partisipasi lebih sering diberi makna

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1024.

¹⁰ Hetifah Sj, Sumanrto, inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 109.

keterlibatan orang secara suka rela tanpa tekanan dan juga didefinisikan sebagai satu kontribusi dari wujud kesediaan masyarakat secara suka rela dalam setiap program kegiatan, diantara bentuknya adalah memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan pembangunan masyarakat.¹¹

Menurut Mikkelsen yang dikutip Aziz Muslim, ada lima klarifikasi atau daftar partisipasi, yaitu: Partisipasi diartikan sebagai pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek pembangunan. Partisipasi dipahami sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah. Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungannya.¹²

Menurut Cohn yang dikutip Abdul Karim, Partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.¹³ Menurut Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang dalam suatu kegiatan dan keterlibatan yang dimaksud bisa berupa keterlibatan mental, emosi maupun fisik.¹⁴

¹¹ Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Tangerang: Nadi Pustaka, 2009), hlm 95.

¹² Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 46-48.

¹³ Abdul Karim, *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012), hlm 104.

¹⁴ Irene Siti Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 59.

a. Manfaat Partisipasi.

Menurut Suciati sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Samsul Huda, manfaat partisipasi yaitu menuju masyarakat yang bertanggung jawab. Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan menjadikan masyarakat yang bersangkutan membuka cakrawala dan mempertimbangkan kepentingan publik sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab mempertimbangkan kepentingan bersama. Meningkatkan proses belajar. Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

Menghilangkan perasaan terasing. Melalui turut aktifnya dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing, karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah. Ketika seseorang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka akan cenderung memiliki kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik, serta menambahkan kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

Menciptakan kesadaran politik. Partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, menumbuhkan pendidikan nyata dari terjadinya partisipasi, sehingga seseorang bisa belajar demokrasi. Jadi, dengan terus berpraktik, pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat

belajar tentang cara mempraktikkannya dalam lingkup yang sudah besar lagi. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, maka rentang kepentingan yang lebih luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

Menjadi sumber dari informasi yang berguna. Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan. Merupakan komitmen sistem demokrasi, partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan.¹⁵

b. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis,¹⁶ yaitu jenis kelamin, partisipasi yang diberikan oleh laki-laki

¹⁵ Ahmad Samsul Huda, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Desa Cebile Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*, Skripsi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, STAIMAFA Pati, hlm. 15-18.

¹⁶ Slamet Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 1993), hlm 137-143.

dan perempuan biasanya berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedudukan dan derajat selanjutnya akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan muda yang berbeda-beda dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

Tingkat Pendidikan. Satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya memiliki pengetahuan yang luas dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan, faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap inovasi. Tingkat Penghasilan. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri, sedangkan penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

Mata Pencarian. Mata pencarian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan.¹⁷

c. Bentuk Partisipasi

Partisipasi memiliki tiga bentuk, yaitu: 1) Pikiran. Partisipasi dalam bentuk ini biasanya terdapat dalam mengidentifikasi masalah, pencarian solusi alternatif serta perencanaan aksi pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat untuk berpendapat terkait perkara yang sedang dirasakannya. 2) Tenaga. Partisipasi dalam bentuk tenaga dapat terwujud dalam tahap pelaksanaan. 3) Uang. Partisipasi dalam bentuk uang biasanya dilaksanakan ketika dalam satu program mengalami kekurangan.¹⁸

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengambil data primer dari suatu lokasi atau tempat tertentu yang disajikan dalam kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Pengumpulan data diperoleh dari (1) wawancara, kepada pendamping PKH Kecamatan Tayu, penerima bantuan PKH. (2) dokumen, berupa laporan kerja pendamping PKH, buku pendamping PKH, rekap anggota PKH dan lain-lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui

¹⁷ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm 84.

¹⁸ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi...*, hlm 89

proses data *reduction*, data *display* dan *verification*¹⁹ dan disajikan dengan menggunakan teks naratif tentang implementasi PKH dan implikasi dari PKH terhadap kehidupan penerima bantuan PKH.

D. Implementasi dan Implikasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tayu

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tayu dimulai pada 5 September 2013, yang ditandai dengan perekrutan 4 (empat) pendamping PKH yang lolos dalam seleksi ujian penerimaan tenaga pendamping PKH. Para pendamping PKH di Kecamatan Tayu terdiri dari Titi Sri Haryanti, SE, Badliatur Rodliah, S.Pd, Jatmiko Hery P, SE dan Dwi Probo Retno, S.Pd. Adapun Dwi Probo Retno, S.Pd sebagai koordinator UPPKH Kecamatan Tayu. Para pendamping PKH dipilih sesuai dengan domisilinya dengan tujuan agar pendampingan yang dilakukan lebih efektif karena jarak antara pendamping, penerima manfaat bantuan PKH, lembaga pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan dan para pihak yang terkait sangat dekat, sehingga hal tersebut berimbas terhadap mudahnya pertemuan antar pendamping, penerima manfaat bantuan PKH dan pihak-pihak yang berkaitan.²⁰ Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tayu berjalan sesuai dengan prosedur UPPKH Pusat, hal ini dapat diidentifikasi dari kegiatan berikut:

¹⁹ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi...*, hlm 246.

²⁰ Laporan Kegiatan Pendamping PKH Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2015.

a) Pemilihan dan Penetapan Penerima Manfaat PKH, calon penerima manfaat PKH dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPPKH Pusat, untuk UPPKH Tayu dalam menjaring bakal calon penerima manfaat PKH melakukan kerja-sama dengan BPS Kabupaten Pati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang disebut Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Poin-poin yang harus dimiliki oleh calon penerima manfaat PKH adalah: Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang di dalamnya terdapat ibu hamil/ibu nifas/anak usia di bawah 5 tahun (BALITA)/anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum masuk ke dalam Pendidikan dasar/anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajar belajar 12 tahun/anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.²¹

b) Pertemuan Awal dan Pembentukan kelompok, agenda yang dilakukan dalam pertemuan awal adalah sosialisasi mengenai PKH dan pernyataan komitmen oleh calon penerima manfaat PKH untuk memenuhi kewajibannya jika menjadi anggota PKH mereka harus Memastikan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajar belajar 12 untuk bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari aktif kegiatan belajar mengajar, Membawa anak usia 0-5 tahun ke fasilitas kesehatan setiap bulan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak, Bagi ibu hamil harus memeriksakan diri dan janinnya ke fasilitas, Kesehatan sesuai dengan prosedur, Kesehatan PKH bagi ibu hamil.²² Untuk pembentukan kelompok biasanya setiap 20 anggota

²¹ Wawancara Badliatur Rodliah, Pendamping PKH Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada 3 April 2016.

²² Dokumen Buku Kerja Pendamping Operator PKH Tahun 2015.pdf.

penerima manfaat PKH dipilih 1 orang sebagai ketua kelompok yang memiliki tugas sebagai penyampai informasi bagi anggota kelompoknya, baik informasi mengenai PKH, pertemuan rutin, pencairan bantuan dan lain-lain.

c) Pendampingan Pertemuan Rutin, Pendamping PKH Kecamatan Tayu setelah membagi kelompok dan menentukan ketua pada masing-masing kelompok kemudian akan menentukan jadwal rutin pertemuan yang disepakati antara pendamping dan penerima manfaat PKH. Pertemuan rutin diisi oleh informasi mengenai program yang berkaitan dengan PKH.

d) Koordinasi dan Pertemuan Rutin dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Koordinasi dan pertemuan rutin dengan pemberi pelayanan kepada penerima manfaat PKH memiliki fungsi untuk memastikan anak penerima manfaat PKH aktif dalam dunia pendidikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan.

e) Pencairan Bantuan Program Keluarga Harapan, Pencairan bantuan PKH yang berupa bantuan dana memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat bantuan PKH. Kebutuhan dasar tersebut berupa pendidikan dan kesehatan. Bantuan dana PKH diturunkan empat kali dalam kurun waktu satu tahun, jumlah dana tersebut berbeda-beda antar-penerima manfaat bantuan PKH sesuai dengan ketentuan jumlah bantuan PKH. Untuk contoh perhitungan bantuan PKH dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	BANTUAN TETAP	BANTUAN BERDASARKAN KOMPONEN				TOTAL BANTUAN
		Bumil/ Nifas/Balita	Anak SD	Anak SMP	Anak SMA	
1	500.000	1.000.000	450.000	750.000	1.000.000	3.700.000
2	500.000	1.000.000	450.000	750.000	-	2.700.000
3	500.000	1.000.000	450.000	-	-	1.950.000
4	500.000	1.000.000	-	750.000	1.000.000	3.250.000
5	500.000	1.000.000	-	750.000	-	2.250.000
6	500.000	1.000.000	450.000	-	1.000.000	2.950.000
7	500.000	1.000.000	-	-	1.000.000	2.500.000
8	500.000	-	450.000	750.000	1.000.000	2.700.000
9	500.000	-	450.000	750.000	-	1.700.000
10	500.000	-	450.000	-	-	950.000
11	500.000	-	-	750.000	1.000.000	2.250.000
12	500.000	-	-	750.000	-	1.250.000
13	500.000	-	450.000	-	1.000.000	1.950.000
14	500.000	-	-	-	1.000.000	1.500.000

f) Konsolidasi Pendamping PKH dan pemberi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Konsolidasi dilakukan pada hari Jumat, hal ini dikarenakan pada hari Senin-Kamis para pendamping PKH memiliki kesibukan masing-masing dengan anggotanya. Konsolidasi dilakukan oleh pendamping PKH dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dibahas dalam konsolidasi berupa evaluasi mengenai

program yang dijalankan, berjalan dengan baik/tidak, biasanya permasalahan yang dibawa pada konsolidasi tersebut biasanya terpecahkan pada saat itu juga, namun jika dalam konsolidasi tersebut menemukan jalan yang buntu, maka akan dibawa ke UPPKH Kabupaten Pati untuk dipecahkan. Diantara manfaat dari konsolidasi adalah jika ada satu permasalahan maka akan dipecahkan bersama-sama oleh orang yang ahli, misalnya kesehatan dan pendidikan. Contohnya, jika ada anak yang di sekolah mengalami penurunan nilai dan partisipasi, maka akan dibahas bersama-sama oleh pendamping dan pihak PKH yang kemudian memunculkan solusi sekaligus strategi yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut.

2. Implikasi Program Keluarga Harapan terhadap Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Tayu

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas penerima manfaat bantuan PKH dalam pendidikan dan kesehatan. Target yang diharapkan dalam bidang pendidikan adalah meningkatnya partisipasi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam pendidikan, peningkatan partisipasi tersebut berupa kehadiran anak penerima manfaat bantuan PKH di dalam tatap muka pelajaran serta peningkatan yang berupa meningkatnya jenjang pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat.

Partisipasi penerima manfaat bantuan PKH dapat diidentifikasi dari 4 indikator yang meliputi: kemauan menerima program dari pemerintah, kontribusi sukarela, keterlibatan secara aktif pada program dan perubahan dalam diri, kehidupan dan lingkungan. 4 indikator tersebut kami uraikan sebagai berikut:

a. Kemauan menerima program dari Pemerintah, kemauan masyarakat dalam menerima program dari Pemerintah (PKH) dapat dibuktikan dari jumlah peserta PKH di Kecamatan Tayu pada tahun 2016 berjumlah 1328 yang di dalamnya terdapat 917 anak usia SD/ sederajat, 521 anak usia SMP/ sederajat, dan 268 anak usia SMA/ sederajat²³ yang tercatat di dalam sistem pendidikan dan sesuai dengan peraturan PKH. Partisipasi anak penerima manfaat PKH menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH dan anak penerima manfaat PKH memiliki kemauan untuk menerima program dari Pemerintah.

b. Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada program, kontribusi tersebut berupa ketersediaan aparat desa yang mau mendata dan mengusulkan warganya yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat PKH kepada pendamping, mendukung pelaksanaan PKH di wilayahnya dengan ikut serta mendampingi pendamping PKH dalam kunjungan ke warga desa.

c. Proses keterlibatan masyarakat secara aktif, Keterlibatan secara aktif dari penerima manfaat PKH terhadap program PKH berupa keterlibatan mereka ke dalam pertemuan rutin. Indikator sukses atau tidaknya pertemuan rutin tersebut tergantung dari keterlibatan penerima manfaat PKH.

d. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungannya, sebagai salah satu indikator dari partisipasi penerima

²³ Data Peserta Pendidikan Penerima Manfaat Bantuan PKH Tahun 2016.

manfaat bantuan PKH adalah keterlibatan penerima manfaat PKH dalam pembangunan diri, kehidupan serta lingkungannya. Secara otomatis KSM yang terdaftar dan mengikuti program PKH terlibat pada pembangunan diri dan kehidupannya, karena KSM tersebut telah terlibat dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan kesehatan.

Dari rangkaian indikator partisipasi penerima manfaat bantuan PKH di atas berimplikasi terhadap kehidupan penerima manfaat bantuan PKH. Implikasi dari partisipasi penerima manfaat PKH dapat diidentifikasi dari 4 indikator yang meliputi: terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab, masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan, peningkatan kepedulian terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan maraknya kalangan terpelajar dari penerima manfaat bantuan PKH. 4 indikator implikasi partisipasi penerima manfaat PKH diuraikan dengan:

- a. Terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab, adanya komitmen yang disepakati oleh penerima manfaat bantuan PKH menjadikan penerima manfaat PKH harus menjalankan kewajibannya berupa memastikan anak mereka ikut serta dalam wajar belajar 12 tahun dengan tatap muka minimal 85% dari total hari aktif.²⁴
- b. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan, Sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping terhadap pentingnya partisipasi pendidikan serta pengetahuan secara luas mengenai

²⁴ Dokumen Buku Kerja Pendamping Operator PKH tahun 2015.pdf.

pendidikan menjadikan penerima manfaat bantuan PKH lebih mengerti tentang makna pendidikan yang berimplikasi terhadap *mindset* penerima manfaat bantuan PKH mengenai pentingnya pendidikan.²⁵

- c. Peningkatan kepedulian terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pada tahun 2013 jumlah anak usia SD/ sederajat sebanyak 941 anak, anak usai SMP/ sederajat sebanyak 489 anak dan anak usia SMA/ sederajat sebanyak 187 anak,²⁶ pada tahun 2016 jumlah partisipasi pendidikan anak penerima manfaat PKH menjadi 917 anak usia SD/ sederajat, 521 anak SMP/ sederajat dan 268 anak usia SMA/ sederajat.²⁷ Pada tahun 2016 jumlah partisipasi pendidikan anak penerima manfaat bantuan PKH mengalami peningkatan sebanyak 81 anak, peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh 3 (tiga) hal, anak usia SMP/ sederajat yang mengalami peningkatan jenjang pendidikan, adanya bantuan dana tambahan untuk anak usia SMA/ sederajat, komitmen terhadap program. Meskipun 3 (tiga) hal tersebut merupakan unsur penyebab meningkatnya jenjang pendidikan anak penerima manfaat bantuan PKH, namun jika tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat dipastikan peningkatan partisipasi pendidikan anak penerima manfaat bantuan PKH tidak akan tercapai.

²⁵ Wawancara dengan Tulus Styarningsih, Penerima Manfaat Bantuan PKH Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada 5 April 2016.

²⁶ Dokumen Laporan Pelaksanaan PKH Kecamatan Tayu Tahun 2013.

²⁷ Dokumen Rekap FASDIK PKH Kecamatan Tayu Tahun 2016.

- d. Maraknya kalangan terpelajar dari penerima manfaat bantuan PKH, PKH merupakan program dengan salah satu *output*-nya meningkatkan sumber daya penerima manfaat bantuan PKH melalui pendidikan. Dapat dipastikan jika penerima manfaat bantuan PKH yang menjalankan komitmennya, secara otomatis akan menciptakan kalangan terpelajar dari lingkungan penerima manfaat bantuan PKH.

3. Analisis Implementasi dan Implikasi Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Pendidikan.

Kesuksesan PKH di Kecamatan Tayu dipengaruhi oleh perencanaan program yang matang, kerja keras pendamping dalam mendampingi penerima manfaat bantuan PKH serta peran orang tua penerima manfaat bantuan PKH yang mampu mengaplikasikan sosialisasi dari para pendamping untuk mendorong anak-anak mereka untuk meningkatkan partisipasi ke dalam lembaga pendidikan.

Dapat diketahui bahwa implikasi PKH di Kecamatan Tayu mampu meningkatkan partisipasi pendidikan anak penerima manfaat bantuan PKH, hal ini berdasarkan kehadiran anak-anak penerima manfaat bantuan PKH yang melebihi 85% serta peningkatan jenjang pendidikan anak penerima manfaat bantuan PKH yang awalnya hanya sampai pada jenjang SMP/ sederajat kini meningkat pada jenjang SMA/ sederajat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa PKH di Kecamatan Tayu dapat berjalan sesuai dengan targetnya apabila dilaksanakan oleh pendamping yang mampu mendampingi penerima manfaat bantuan PKH dengan profesional, memiliki inovasi dan

strategi yang matang serta didukung oleh masyarakat yang tidak apatis serta mudah untuk diajak maju. Apabila satu bagian komponen tersebut (pendamping dan penerima manfaat bantuan PKH) tidak sesuai (pendamping yang tidak profesional/masyarakat yang apatis) maka bisa dipastikan bahwa PKH tidak dapat berjalan sesuai target.

PKH di dalam praktiknya telah mampu meningkatkan partisipasi penerima manfaat PKH, baik partisipasi dalam tatap muka maupun dalam hal jenjang pendidikan. hal tersebut ditandai dengan ragam indikator partisipasi yang berimplikasi pada kehidupan penerima manfaat PKH, hal ini sesuai dengan teori Cohn yang dikutip Abdul Karim, yaitu: partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Karena di dalam praktiknya penerima manfaat PKH ikut serta dalam pembuatan keputusan, yaitu keputusan untuk mengikuti PKH beserta kewajibannya, melaksanakan PKH dengan berpartisipasi dalam pendidikan dan memperoleh kemanfaatan yang berupa implikasi dari partisipasi tersebut, yaitu terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab, masyarakat yang sadar akan pendidikan, kepedulian terhadap jenjang pendidikan dan terciptanya kalangan terpelajar.

E. Penutup

Akhirnya dapat diketahui bahwa PKH di Kecamatan Tayu berjalan sesuai target dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1328 KSM. Meliputi 917 anak peserta SD/ sederajat, 521 anak peserta SMP/ Sederajat dan pada tahun 2016 UPPKH Kecamatan Tayu telah berhasil mencakup 268 anak peserta SMA/ sederajat, hal ini membuktikan UPPKH Kecamatan Tayu ikut serta dalam peningkatan jenjang pendidikan anak dari KSM dengan jumlah tatap muka diatas angka 85%. Hal itu dikarenakan perencanaan program yang matang, kerja keras pendamping dalam mendampingi penerima manfaat bantuan PKH serta peran orang tua penerima manfaat bantuan PKH yang mampu mengaplikasikan sosialisasi dari para pendamping untuk mendorong anak-anak mereka untuk meningkatkan partisipasi ke dalam lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Peserta Pendidikan Penerima Manfaat Bantuan PKH tahun 2016.
Dokumen Buku Kerja Pendamping Operator PKH 2015.pdf.
- Dwiningrum, Irene Siti Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fitri Puspita Sari "Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul" Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogya Karta dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 3 Februari 2016.
- Grace Leliharni Damanik "Respon Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang", Jurnal Universitas Sumatera Utara dalam

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/2136>

diakses pada 03 Februari 2016.

Hermawati, Istiana, dkk, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)*, Yogyakarta: B2P3KS PRESS, 2012.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah->, diakses pada 03 Februari 2016.

<http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/121-kemiskinan-daerah-di-kabupaten-pati>, diakses pada 03 Februari 2016.

http://www.unicef.org/indonesia/id/A5_-_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf, diakses pada 03 Februari 2016.

Huda, Ahmad Samsul, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Desa Cebilek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*, Skripsi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, STAIMAFA Pati.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Karim, Abdul, *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012.

Laporan Kegiatan Pendamping PKH Kecamatan Tayu tahun 2015.

Laporan Pelaksanaan PKH Kecamatan Tayu tahun 2013.

Mulyadi, Mohammad, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Tangerang: Nadi Pustaka, 2009.

Muslim, Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Oktiano Regian Zufri “*Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang*”, Skripsi Universitas Jember dalam <http://repository.unej.ac.id> diakses pada 03 Februari 2016.

Rekap FASDIK PKH Kecamatan Tayu tahun 2016.

Sumarto, Hetifah Sj., *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Wawancara Badliatur Rodliah, Pendamping PKH Kecamatan Tayu pada 30 Januari 2016.

Wawancara dengan Dwi Probo Retno, Pendamping PKH Kecamatan Tayu pada 6 April 2016.

Wawancara dengan Jatmiko Hery P, Pendamping PKH Kecamatan Tayu pada 4 April 2016

Wawancara dengan Titi Sri Haryanti, Pendamping PKH Kecamatan Tayu pada 4 April 2016.

Wawancara dengan Tulus Styaningsih, Penerima Manfaat Bantuan PKH Kecamatan Tayu pada 5 April 2016.

Y., Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1993. Wawancara dengan Suklimah, Penerima Manfaat Bantuan PKH Kecamatan Tayu pada 5 April 2016.